

DAFTAR PUSTAKA

- Andaiyani. (2012). Pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan belanja operasional terhadap jumlah alokasi belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat (ringkasan tesis). Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>
- Andriani, E. (2012). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/>
- Badan Pusat Statistik RI. (2016). Berita Resmi Statistik (No. 57/06/Th. XIX). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2016/06/15/1278/indeks-pembangunan-manusia-2015.html>
- Badan Pusat Statistik RI. (2017). Berita Resmi Statistik (No. 37/04/Th. XX). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/04/17/1311/pada-tahun-2016--ipm-indonesia-telah-mencapai-70-18--memasuki-kategori--tinggi-.html>
- Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Girsang, Heri AV. (2015). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro journal of accounting*. 4. 1-11. Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Halim, A., Kusufi, M.S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendriyani, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi di Indonesia. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>
- Hilmi, A.Z., Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>
- Indeks Pembangunan Manusia. (2018). Dalam Wikipedia. Diakses 22 Maret 2018, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia
- Khasanah, Nur L. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro journal of accounting*. 3. 1-11. Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lesmana, S.I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>

- Liestiani, A., Martani, D. (2008). Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. *Asian Academic Accounting Association (AAAA)*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/267560779>
- Maulana, C., Handayani, B. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*. 4. 1-11. Diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Mulyadi. (2002). *Auditing Buku 1 (Edisi Enam)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patrick, P.A. (2007). The Determinants of Organizational Innovativeness: A Study of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Diakses dari <https://scholar.google.co.id/>
- Patton, T. K., and Bean, D. R. (2001). The why and how of the new capital asset reporting requirements. *Public Budgeting and Finance*. 21. 31-46.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priharjanto, A., Wardani, Y.Y. (2016). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Diakses dari <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/72/62>
- Puspitasari, Y., Habiburrochman. (2013). Penerapan PSAK No.109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4. 330-507. Diakses dari <http://jamal.ub.ac.id/>
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. Vol. 2 No. 1 Juni 2007. Diakses dari google.com
- Setiawan, M. B., Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>
- Syafitri, F., Setyaningrum, D. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 9. 154-170. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/>

- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 6. 45-62. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>
- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. *Working Paper Series*.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika terapan teori dan aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Yulianingtyas, R., Suhardjanto, D. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/>